

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selalu membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, diantaranya adalah pajak, pinjaman luar negeri ataupun investasi pihak ketiga serta sumber lainnya. Dari berbagai alternatif tersebut, pajak adalah sumber yang paling “mandiri” dibandingkan sumber yang lain, karena sifatnya yang bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya. Demikian pentingnya peranan pajak, maka segala upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, baik yang sifatnya intensifikasi, ekstensifikasi hingga modernisasi sistem perpajakan (Kesuma, 2016).

Pajak pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati, sehingga karena disebabkan sifatnya yang merupakan kewajiban bahkan bisa dikatakan beban membuat wajib pajak “secara naluri” berusaha untuk mengurangi, menunda bahkan berusaha untuk tidak membayar pajak. Adanya pola sikap seperti ini yang berpotensi menghambat upaya pemungutan pajak. Meskipun tidak bisa di generalisasi karena masih banyak juga wajib pajak yang penuh kesadaran menjalankan kewajiban perpajakannya (Kesuma, 2016).

Namun pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, banyak harta warga Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk *liquid* maupun *non-liquid* yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Husnurrosyidah *et al.*, 2016).

Walaupun terjadi penurunan penerimaan pajak, dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Jika kita lihat data terbaru sumber penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2016 mencapai 1.546,7 dari 1.822,5 atau sekitar 84,86% pendapatan Negara. Angka ini menunjukkan penerimaan Negara di sektor pajak merupakan penerimaan terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kementerian Keuangan, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat dua jenis perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau masyarakat yang dapat menghambat dalam upaya pemungutan pajak (Mardiasmo, 2016). Perlawanan yang pertama adalah perlawanan pasif yang disebabkan karena perkembangan intelektual masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dimengerti dan kurangnya kontrol atas pelaksanaan pemungutan pajak. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan aktif yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak, baik yang bersifat legal maupun yang bersifat ilegal. Apapun bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tentu akan berimbas pada terhambatnya upaya pemungutan

pajak yang akhirnya berujung pada tidak maksimalnya jumlah pajak yang bisa dikumpulkan.

Demi mengurangi perlawanan tersebut, negara selalu berupaya untuk menyempurnakan sistem perpajakan nasional. Proses pengembangan terus menerus dilakukan pemerintah, seperti perbaikan sistem administrasi yang dipermudah, penyempurnaan undang-undang perpajakan, peningkatan mutu petugas pajak, penyuluhan dan lain lain. Hal tersebut dilakukan supaya sistem perpajakan tidak hanya berorientasi kepada potensi jumlah nominal pajak yang akan dihimpun tapi juga memperhatikan aspek yang menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga diharapkan bahwa peraturan perpajakan yang baru lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah melakukan pengoptimalan intensifikasi perpajakannya dengan mengeluarkan program terbarunya yaitu Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang “Pengampunan Pajak”. Dimana *Tax Amnesty* tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program *Tax Amnesty* di Indonesia.

Keseriusan program *Tax Amnesty* sangat didukung oleh peran serta pemerintah. Bahkan presiden Jokowi sangat serius dalam melakukan pengawasan program *Tax Amnesty*. Beliau berjanji akan mengawasi secara langsung pelaksanaan *Tax Amnesty*. Janji tersebut dinyatakan dengan pembentukan satgas khusus yang terdiri dari BPKP dan intelijen serta pengawasan langsung dari presiden. Sosialisasi presiden mengenai *Tax Amnesty* tidak hanya dilakukan di

Surabaya, tetapi dilaksanakan juga di Bandung, Medan, Semarang, Solo dan kota-kota besar lainnya (Focusnusa.com, 2016 dalam Husnurrosyidah *et al.*, 2016).

Berbagai upaya terkait dengan keberhasilan program *Tax Amnesty* telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak ditahun 2016. Program *Tax Amnesty* memiliki jargon “Ungkap-Tebus-Lega” yang bisa menjadi daya tarik banyak Wajib Pajak supaya ingin mengikuti program *Tax Amnesty*. Tidak hanya upaya dan usaha, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki harapan besar atas berlakunya program *Tax Amnesty* ini. Namun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah demi kelancaran *Tax Amnesty* menoreh pro dan kontra diantara Wajib Pajak. Menurut hasil observasi yang tidak sengaja peneliti lakukan sebelumnya, 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) Wajib Pajak mengeluh terhadap segala tata cara dalam hal penyusunan hingga pelaporan Surat Pernyataan Harta *Tax Amnesty* yang bukan membantu Wajib Pajaknya, tetapi semakin mempersulit. Hal ini bisa menjadi salah satu kendala enggannya beberapa Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak mengetahui secara mendalam mengenai dunia perpajakan.

Tidak berhenti disitu saja, dengan munculnya banyak peraturan-peraturan baru mengenai *Tax Amnesty* yang dianggap semakin membingungkan, membuat beberapa Wajib Pajak merasa cemas dan mulai meragukan bahkan menyesal telah mengikuti program *Tax Amnesty*.

Berdasarkan Latar Belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “**Analisis Intensifikasi Pajak Melalui Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* Tahun 2016 Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan intensifikasi pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* pada Kanwil DJP Jawa Timur I Surabaya?
2. Bagaimanakah tingkat efektifitas program *Tax Amnesty* pada Kanwil DJP Jawa Timur I Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengkaji penerapan intensifikasi pajak melalui kebijakan *Tax Amnesty* pada Kanwil DJP Jawa Timur I Surabaya.
2. Untuk mengkaji tingkat efektifitas program *Tax Amnesty* pada Kanwil DJP Jawa Timur I Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis :
 - 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi perpajakan yang berjalan di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia.

- 2) Mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci mengenai kebijakan *Tax Amnesty*.
 - 3) Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai kebijakan *Tax Amnesty*.
 - 4) Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang berkepetingan.
- b. Bagi Praktisi:
- 1) Sebagai bahan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kota Surabaya dalam menangani kebijakan *Tax Amnesty*.
 - 2) Memberikan sumbangsih atau kontribusi kepada masyarakat dibidang ekonomi terhadap pengembangan teori pajak yang diberlakukan di Indonesia.
 - 3) Sebagai bahan masukan mengenai tindak lanjut kebijakan *Tax Amnesty* bagi Wajib Pajak yang mengikutinya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada program intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya melalui program *Tax Amnesty* tahun 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pajak

2.1.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.1.4 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016), Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.1.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak.

- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.1.1.7 Pengelompokan Pajak

2.1.1.7.1 Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.1.7.2 Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.1.7.3 Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.1.8.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.8.2 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.8.3 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri

- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi

- c. Kedaluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan

2.1.1.10 Hambatan Pemungut Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.11 Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

- 1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.12 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, pengertian Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2.1.2 Teori *Tax Amnesty*

2.1.2.1 Aspek Legalitas *Tax Amnesty*

Program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, dimana program *Tax Amnesty* ini merupakan bagian dari program Intensifikasi Pajak yang melakukan peningkatan penerimaan pajak penghasilan terkait dengan perluasan objek pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 ini menjelaskan tentang pengertian *Tax Amnesty*, Wajib Pajak yang berhak mengikuti *Tax Amnesty*, nilai Harta dan Utang yang bisa mengikuti *Tax Amnesty*, lama periode *Tax Amnesty* berlangsung, besar tarif tebusan yang berlaku serta tata cara pelaporan Surat Pernyataan Harta.

2.1.2.2 Ketentuan Umum *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Bab I Ketentuan Umum dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Tunggalan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

2.1.2.3 Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pelaksanaan program *Tax Amnesty* ini memiliki beberapa asas dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *Tax Amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan; dan
- d. Kepentingan nasional.

Selain itu Tax Amnesty memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.1.2.4 Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Setiap program perpajakan akan selalu ada pihak dimana menjadi subjek atau objek pajaknya, begitu juga program *Tax Amnesty*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Bab III Subjek dan Objek Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa:

Pasal 3

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
- a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2.5 Tarif dan Periode *Tax Amnesty*

Besaran tarif tebusan yang berlaku serta jangka waktu berlakunya *Tax Amnesty* dijelaskan secara mendetail oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 pada Bab IV Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan, yaitu:

Pasal 4

1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5

1. Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
2. Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
3. Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 6

1. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
 - b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

2. Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
3. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
4. Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
5. Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
 - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
 - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas,
Dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 7

1. Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
 - a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan

- b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
2. Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:
 - a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
3. Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
4. Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
5. Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
6. Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang

ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

2.1.2.6 Pertimbangan *Tax Amnesty*

Menurut Riadi (dalam Devano, 2006:137-138) dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu:

1. *Underground Economy*. Bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).
2. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal. Kebijakan *Tax Amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.
3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah

mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax Amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

2.1.2.7 Jenis-Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Riadi (dalam Sawyer, 2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*, yaitu:

1. *Filling amnesty*. Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
2. *Record-keeping amnesty*. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
3. *Revision amnesty*. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar)

dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4. *Investigation amnesty*. Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).
5. *Prosecution amnesty*. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

2.1.2.8 Deklarasi dan Repatriasi

Sesuai dengan www.pajak.go.id, pengertian deklarasi adalah pernyataan Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* dengan mendeklarasikan aset-asetnya di luar negeri tanpa mengalihkannya ke dalam negeri. Sedangkan repatriasi, Wajib Pajak tersebut sekaligus mengalihkan aset-asetnya dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Sebelumnya

1. Jurnal penelitian yang pertama disusun oleh Kesuma (2016) dengan judul “Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi

Fungsi Pajak”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan *Tax Amnesty* benar merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari pajak, yaitu fungsi anggaran dan mengatur. Namun terdapat pro dan kontra atas pelaksanaannya. Beberapa wajib pajak beranggapan bahwa pengampunan pajak sangat menguntungkan bagi para pengemplang pajak, sedangkan bagi wajib pajak yang jujur tidak mendapatkan manfaat yang sama.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu I

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak	Analisis Intensifikasi Pajak Melalui Penerapan Program <i>Tax Amnesty</i> Tahun 2016 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I di Surabaya
Tahun	2016	2017
Objek Penelitian	Tax Amnesty	Tax Amnesty
Hasil Penelitian	Evaluasi penerapan <i>Tax Amnesty</i> sebagai optimalisasi fungsi pajak, jadi hanya melihat apakah <i>Tax Amnesty</i> ini sesuai dengan fungsi pajak	Evaluasi intensifikasi pajak melalui penerapan <i>Tax Amnesty</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Surabaya

Sumber: Penulis

- Jurnal penelitian yang kedua disusun oleh Husnurrosyidah dan Ulfah Nuraini (2016) dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh

terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karesidenan Pati dikarenakan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, sanksi pajak yang berlaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karesidenan Pati.

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu II

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati	Analisis Intensifikasi Pajak Melalui Penerapan Program Tax Amnesty Tahun 2016 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I di Surabaya
Tahun	2016	2017
Objek Penelitian	Tax Amnesty	Tax Amnesty
Hasil Penelitian	Evaluasi penerapan <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di BMT se-eks Karedisenan Pati	Evaluasi intensifikasi pajak melalui penerapan <i>Tax Amnesty</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Surabaya

Sumber: Penulis

- Jurnal penelitian yang ketiga disusun oleh Setyaningsih T. dan Antin Okfitasari (2016) dengan judul “Mengapa Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty* (Studi Kasus di Solo)”. Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa (a) pajak tetap menjadi sebetulnya gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat; (b) Wajib Pajak melakukan program *Tax Amnesty* bekerja sama dengan pihak luar (konsultan pajak); (c) dalam pelaksanaannya program sulit dipahami sehingga wajib pajak merasakan

rumitnya menyusun laporan *Tax Amnesty*; (d) Harapan wajib pajak mengenai adanya kepastian alokasi dana *Tax Amnesty*, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

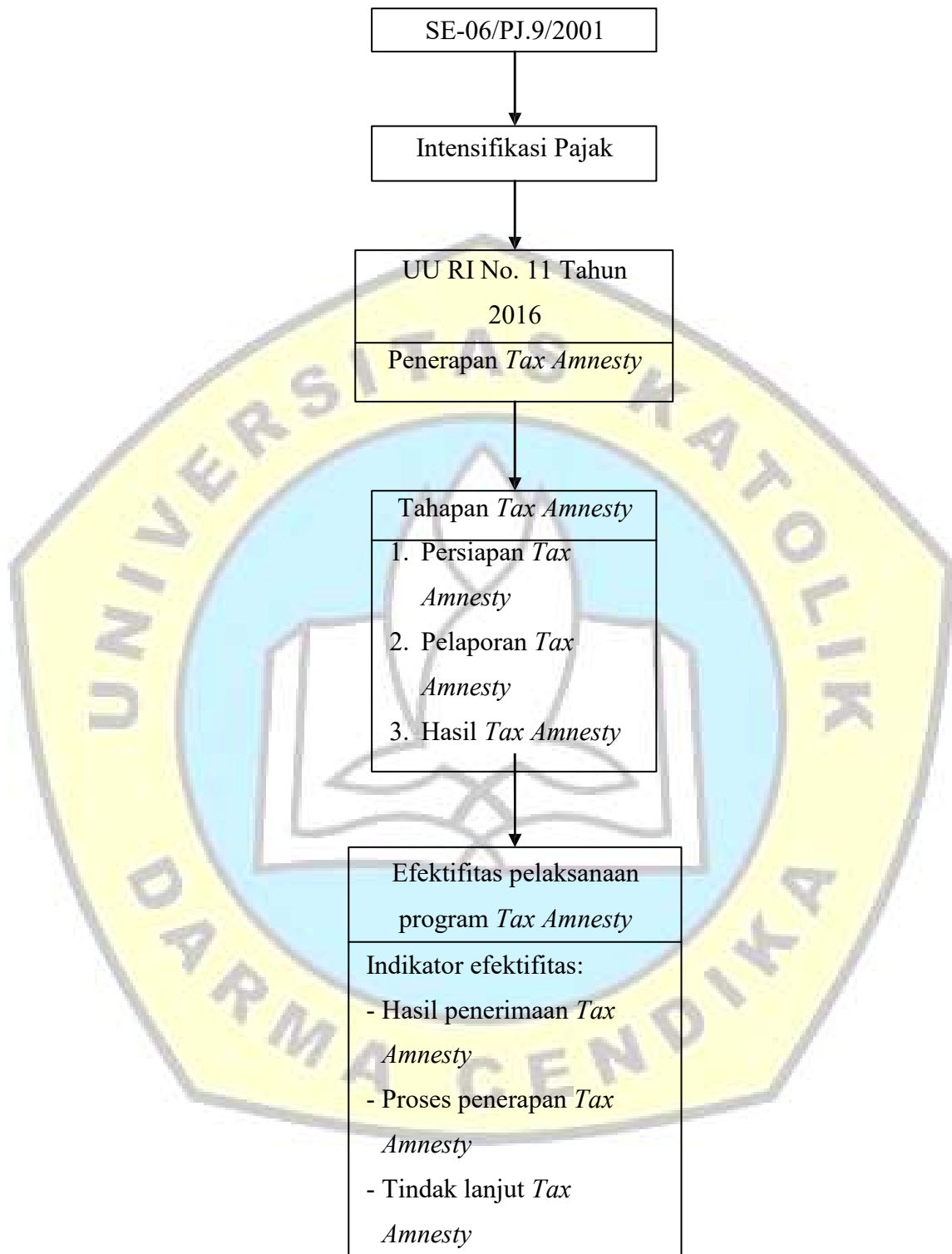
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu III

Indikator	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Judul	Mengapa Wajib Pajak Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> (Studi Kasus di Solo)	Analisis Intensifikasi Pajak Melalui Penerapan Program Tax Amnesty Tahun 2016 Pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I di Surabaya
Tahun	2016	2017
Objek Penelitian	Tax Amnesty	Tax Amnesty
Hasil Penelitian	Alasan Wajib Pajak Solo mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	Evaluasi intensifikasi pajak melalui penerapan <i>Tax Amnesty</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Surabaya

Sumber: Penulis

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran



Sumber: Penulis